

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengambilan data saat Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan dan berdasarkan pembahasan bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan menggunakan *Withholding Tax System* yaitu proses pemotongan atau pemungutan pajak terutang dilimpahkan kepada pihak ketiga.
2. Tarif untuk PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua menurut undang undang, untuk menentukan pengenaan tarif wajib pajak sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
3. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga dapat mempermudah dalam perhitungan pajak dan menghindari resiko kesalahan hitung.
4. Tenaga Ahli menjadi salah satu peran sebagai penyedia jasa professional yang dapat membutuhkan keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku pemberi kerja berperan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas tenaga ahli.
5. Sekretariat DPRD telah menerapkan prosedur perpajakan dan melakukan sistem pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan form 1721 baik melalui e-spt ataupun secara manual serta dilanjutkan dengan mengupload form tersebut melalui e-filing pada website resmi djp online.

7. Fasilitas elektronik yang disediakan oleh DJP secara online sudah sangat akurat dalam perhitungan dan membantu dalam pelaporan perpajakan setiap wajib pajak serta lebih efisien karena tidak perlu mengantri ke KPP.

#### **IV.2 Saran**

Setelah melakukan praktik kerja lapangan penulis menemukan beberapa hal yang berbeda dengan pembelajaran, dengan ini penulis ajukan beberapa saran diantaranya:

1. Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya proses pemungutan pajak penghasilan kepada wajib pajak dapat berjalan dengan optimal
2. Sekretariat DPRD semestinya bersikap tegas mengenai wajib pajak yang belum mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.